

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah yang bersifat transparan dan akuntabel merupakan fondasi utama dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas menjamin bahwa setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sementara transparansi memastikan adanya keterbukaan informasi dalam setiap proses pengelolaan keuangan. Prinsip kedua ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, termasuk di tingkat kecamatan. (Rosidah et al., 2023)

Untuk mendukung pengelolaan keuangan yang teratur dan sistematis, pemerintah telah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik. SAP bertujuan untuk menciptakan keseragaman, relevansi, dan konsistensi informasi keuangan yang disajikan oleh entitas pemerintahan. Dengan penerapan SAP yang konsisten, proses pelaporan keuangan menjadi lebih terstruktur dan dapat diaudit secara objektif, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya praktik manipulatif atau penipuan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP disusun untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang dapat dipercaya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. SAP juga mendorong transparansi dan akuntabilitas karena seluruh entitas pemerintahan diwajibkan menyusun laporan keuangan berbasis akrual yang mencerminkan kondisi keuangan secara menyeluruh. (PP No. 71 Tahun 2010).

Selain penerapan standar akuntansi, keberadaan pengendalian internal juga merupakan elemen penting dalam menjaga kerahasiaan informasi

keuangan dan mencegah terjadinya penyimpangan. Pengendalian internal mencakup sistem dan prosedur seperti izin tugas, otorisasi transaksi, pengawasan internal, serta dokumentasi yang memadai. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengendalian internal yang baik memiliki hubungan yang kuat dengan menurunnya tingkat penipuan dalam sektor organisasi publik.(Dwi & Supartha, 2023)

Namun penerapan teknologi dan sistem yang canggih tidak akan efektif tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM). Dalam konteks ini, integritas SDM menjadi aspek krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari kecurangan. SDM yang memiliki komitmen terhadap etika, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan akan lebih kecil kemungkinannya terlibat dalam tindakan penipuan. Oleh karena itu, pembangunan budaya organisasi yang berorientasi pada kejujuran dan nilai-nilai moral menjadi landasan penting dalam pengelolaan keuangan masyarakat.(Basuki, 2023)

Selain itu, hasil wawancara awal dengan salah satu aparatur pengelola keuangan Kecamatan Kramat Mulya menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual masih menghadapi kendala, khususnya terkait pemahaman teknis dan keterbatasan sumber daya manusia. Aparatur tersebut juga menyampaikan bahwa beban kerja yang tinggi dan keterbatasan pengawasan berpotensi menimbulkan kesalahan maupun penyimpangan dalam proses pengelolaan keuangan. Temuan awal ini mengindikasikan adanya celah risiko *fraud* yang perlu dikaji lebih mendalam.

Kondisi empiris tersebut menunjukkan bahwa risiko *fraud* dalam pengelolaan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh sistem, pengawasan, dan budaya organisasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka teoritis yang mampu menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya *fraud* secara lebih komprehensif. Salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah *Fraud Triangle Theory*.

Di tengah upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, Kecamatan Kramat Mulya sebagai salah satu unit pelaksana teknis

pemerintahan di daerah juga berjuang melawan tantangan dalam pengelolaan keuangan. Beberapa indikasi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat risiko penipuan akibat lemahnya pengendalian internal, rendahnya pemanfaatan sistem SAP secara optimal, serta belum meratanya pemahaman SDM terhadap etika dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas laporan keuangan dan efektivitas penggunaan anggaran publik di wilayah tersebut.(Safitri & Retnosari, 2023)

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penelitian mengenai hubungan antara penerapan SAP, pengendalian internal, dan integritas SDM terhadap pencegahan penipuan menjadi sangat relevan dan penting dilakukan di Kecamatan Kramat Mulya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penipuan serta memberikan kontribusi dalam penyusunan strategi penguatan sistem keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel di tingkat lokal.(Pokhrel, 2024)

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, pengelolaan keuangan daerah menjadi tolak ukur akuntabilitas publik. Oleh karena itu, tata kelola keuangan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh sistem dan regulasi yang berlaku, tetapi juga ditopang oleh kualitas implementasi dan integritas pelaksana kebijakan. Transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dalam pelaporan keuangan menjadi elemen yang mutlak diperlukan guna meminimalisir praktik *fraud* atau kecurangan yang dapat merugikan keuangan negara.(Vidyasari & Suryono, 2021)

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tingginya jumlah penyimpangan penyimpangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yang pada tahun 2023 tercatat sebanyak 10.351 kasus di seluruh Indonesia, salah satunya disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal dan rendahnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan. Di berbagai daerah, termasuk tingkat kecamatan, hal ini menimbulkan keraguan terhadap validitas laporan keuangan yang disajikan. Penipuan atau *fraud* yang

terjadi tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan publik dan merusak kredibilitas institusi pemerintahan.(Kurnia, 2020)

Penerapan SAP dalam sektor publik sesungguhnya merupakan langkah strategis pemerintah untuk menstandarkan pelaporan keuangan dengan basis akrual agar seluruh transaksi tercatat secara menyeluruh dan sistematis. Namun, menurut laporan evaluasi Kementerian Keuangan tahun 2022, banyak pemerintah daerah yang masih mengalami kesulitan dalam menerapkan SAP secara konsisten, terutama di unit-unit teknis seperti kecamatan. Kendala tersebut dapat berupa kurangnya pelatihan, keterbatasan sumber daya, hingga resistensi terhadap perubahan sistem dari berbasis kas menuju berbasis akrual.(Lasabuda et al., 2020)

Sejalan dengan hal tersebut, pengendalian internal yang efektif menjadi lapisan pertahanan pertama dalam mencegah terjadinya *fraud*. Pengendalian internal mencakup pengawasan melekat, prosedur audit internal, pemisahan tugas, serta kebijakan disiplin keuangan. COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) dalam kerangka kerja pengendalian internalnya menekankan pentingnya lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Jika salah satu dari komponen tersebut tidak berjalan optimal, maka potensi *fraud* akan meningkat secara signifikan.(Ramadhanti & Safrida, 2023)

Namun demikian, sebaik apa pun sistem dan prosedur yang dibangun, integritas sumber daya manusia tetap menjadi kunci utama. Tanpa integritas individu yang tinggi, celah-celah sistem akan mudah dimanipulasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Integritas meliputi kejujuran, tanggung jawab, loyalitas terhadap nilai-nilai organisasi, dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam konteks keuangan publik, pegawai atau aparatur yang tidak memiliki integritas dapat mengabaikan prinsip akuntabilitas demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, pembangunan budaya organisasi yang menjunjung

tinggi etika dan nilai moral menjadi hal yang mendesak untuk diterapkan.(Hukum et al., 2025)

Kecamatan sebagai unit pelaksana pemerintahan terdepan dalam melayani masyarakat, memiliki peran penting dalam menjaga tata kelola keuangan yang sehat. Meskipun skalanya lebih kecil dibandingkan pemerintah kota atau kabupaten, pengelolaan anggaran di tingkat kecamatan tetap berisiko tinggi terhadap *fraud*, terutama jika tidak ditunjang oleh kapasitas SDM yang memadai dan sistem pengendalian yang kuat. Berdasarkan observasi awal dan laporan monitoring keuangan internal daerah, Kecamatan Kramat Mulya masih menunjukkan indikasi lemahnya pengawasan dan ketidakselarasan dalam pelaporan anggaran. Hal ini diperparah dengan minimnya pelatihan teknis dan moral kepada staf pelaksana.(Simanjuntak, 2024)

Dalam banyak kasus, *fraud* terjadi bukan karena niat semata, tetapi karena adanya kesempatan dan lemahnya pengawasan. Teori *Fraud Triangle* yang diperkenalkan oleh Donald Cressey menyebutkan bahwa tiga elemen yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud* adalah: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*). Ketiga faktor ini saling melengkapi dan sangat mungkin terjadi di lingkungan pemerintahan daerah yang belum menerapkan sistem kontrol internal dan etika kerja yang kuat.(I. P. Rahmawati & Nuruddin, 2021)

Penelitian ini berangkat dari kondisi empiris di Kecamatan Kramat Mulya yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perencanaan anggaran melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta didukung oleh penggunaan sistem aplikasi keuangan daerah. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala operasional dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, diketahui bahwa proses pencatatan keuangan masih memerlukan pengecekan manual sebelum diinput ke dalam sistem aplikasi guna memastikan kesesuaian data. Selain itu, keterbatasan sumber daya

manusia menyebabkan adanya rangkap tugas dalam pengelolaan keuangan, sehingga berpotensi mempengaruhi efektivitas sistem pengendalian internal.

Di samping itu, kendala lain yang dihadapi adalah keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah daerah yang terkadang menyebabkan kegiatan harus didahului dengan penggunaan dana talangan sementara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi beberapa tantangan yang berpotensi menimbulkan risiko kesalahan administrasi maupun penyimpangan apabila tidak didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai serta integritas sumber daya manusia yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang tidak hanya mengkaji penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pengendalian internal, dan integritas sumber daya manusia, tetapi juga merumuskan strategi yang tepat dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah melalui pendekatan analisis SWOT.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara konsep teoritis dengan realitas empiris di lapangan. Secara teoritis, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pengendalian internal, dan integritas sumber daya manusia diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari fraud. Namun secara empiris, kondisi di Kecamatan Kramat Mulya menunjukkan bahwa penerapan SAP belum sepenuhnya optimal, pengendalian internal masih memiliki kelemahan, serta keterbatasan sumber daya manusia berpotensi mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan.

Selain itu, terdapat kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi aktual, di mana sistem yang telah dirancang secara formal belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam mengintegrasikan aspek sistem, pengawasan, dan integritas dalam pencegahan fraud. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara lebih mendalam faktor-faktor tersebut serta merumuskan strategi yang tepat

melalui pendekatan analisis SWOT dalam pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Kramat Mulya.

B. Identifikasi Masalah

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam pengelolaan keuangan di Kecamatan Kramat Mulya masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya.
2. Sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya berjalan secara optimal.
3. Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan adanya rangkap tugas dalam pengelolaan keuangan di Kecamatan Kramat Mulya.
4. Keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah daerah berpotensi mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan.
5. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko kesalahan administrasi maupun potensi terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan daerah.

C. Rumusan Masalah

Sebagai hasil dari pengamatan dan identifikasi masalah oleh peneliti, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji apakah pemahaman dan praktik pencegahan *fraud*, khususnya di Kecamatan Kramat Mulya, dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama mengenai efektivitas strategi pencegahan *fraud*, serta sejauh mana pemahaman masyarakat dan aparatur terkait turut berperan dalam upaya tersebut. Peneliti merumuskan permasalahan ini sebagai dasar untuk mengarahkan fokus analisis dan menghasilkan temuan yang relevan dengan isu yang diangkat dan merangkum permasalahan yang diidentifikasi untuk kemudian dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pengelolaan sistem keuangan daerah di Kecamatan Kramat Mulya?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Kramat Mulya?

3. Bagaimana peran integritas sumber daya manusia dalam mendukung pencegahan fraud pada pengelolaan sistem keuangan daerah di Kecamatan Kramat Mulya?
4. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat pengelolaan sistem keuangan daerah dalam upaya pencegahan fraud di Kecamatan Kramat Mulya berdasarkan analisis SWOT?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis pelaksanaan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Kramat Mulya.
- 2) Menganalisis peran integritas sumber daya manusia dalam mendukung upaya pencegahan fraud pada pengelolaan keuangan Kecamatan Kramat Mulya.
- 3) Menganalisis secara komprehensif keterkaitan penerapan SAP, pengendalian internal, dan integritas sumber daya manusia dalam upaya pencegahan fraud pada pengelolaan keuangan Kecamatan Kramat Mulya.

2. Manfaat Penelitian

Usai pelaksanaan prosedur penelitian dan perolehan data, diharapkan temuan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1) Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa studi, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, khususnya dalam meningkatkan

implementasi SAP, efektivitas pengendalian internal, dan pembinaan integritas SDM.

3) Bagi Akademisi

Sebagai referensi tambahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan daerah.

4) Bagi Masyarakat

Sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab ilmiah atas kondisi tata kelola keuangan publik di daerah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah setempat.

E. Sistematika Penulisan

Latar Belakang

Menjelaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta peran SAP dan pengendalian internal dalam mencegah penipuan.

Identifikasi Masalah

Menguraikan masalah-masalah yang ada, seperti potensi penipuan dalam sistem akuntansi keuangan, penerapan SAP yang belum optimal, kurangnya pengendalian internal, dan rendahnya kesadaran akan integritas.

Rumusan Masalah

Menyusun pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, seperti pengaruh SAP, peran pengendalian internal, dan kontribusi integritas SDM terhadap pencegahan penipuan.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, seperti mengidentifikasi faktor-faktor pengendalian internal dan menganalisis dampak penerapan SAP.

Manfaat Penelitian

Menyampaikan manfaat penelitian bagi penulis, teori, praktik, dan akademis.